

ASEAN, INDONESIA DAN RUSIA TIMUR JAUH: PELUANG DAN DIVERSIFIKASI

ASEAN, INDONESIA AND RUSSIA FAR EAST: OPPORTUNITIES AND DIVERSIFICATION

Adri Arlan
Universitas Pelita Harapan, Karawaci
e-mail: adri.arlan@uph.edu

ABSTRACT

Indonesia-Russia relations started since the end of World War II. Early relations were poor but became close during the Sukarno period. The post-Soviet era ushered a new height of Russia's political, diplomatic, and economic presence in Southeast Asia. After the dissolution of the United Soviet Socialist Republic (USSR), Russia has focused on a grand re-engineering project, an important component of institutional stability. Part of the re-structuring included ambitious actions to re-brand a powerful image of her position in Southeast Asia, and in Asia and the Pacific, in general. Scholars have argued that there is a lack of knowledge in terms of Russia's relations with countries of Southeast Asia (ASEAN). This can be explained by Russia's unfamiliarity over the region's diversity and by her insecurity with the dominance of the United States and China, among others. Nevertheless, the Putin Government has shifted its lens towards the Southeast Asian region by establishing stronger ties in areas of security and defense, energy development, and trade and people-to-people exchanges. This paper employs an 'ethic' perspective analysis of the actions taken by Russia in these areas and suggests possible future actions to enhance collaboration and cooperation with Southeast Asian countries such as Indonesia.

Keywords: Economic development; Collaboration; ASEAN; Russian Far East.

ABSTRAK

Hubungan Indonesia-Rusia telah dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia ke II. Kerja sama yang terjadi antara kedua negara terjalin cukup erat di era Presiden Sukarno. Pasca runtuhnya Uni Soviet terjadi perubahan dinamika dalam hubungan politik, diplomatik dan ekonomi Rusia di Asia Tenggara. Saat ini Rusia fokus dalam menata ulang *grand strategy* penguatan kestabilan institusi baik dalam maupun luar negeri. Dalam hal penataan ulang kebijakan strategi luar negeri, Rusia berupaya untuk menciptakan *image* baru di Asia Tenggara dan Pasifik. Secara umum, para ahli berargumen bahwa masih minimnya wawasan dalam konteks hubungan Rusia dan Asosiasi Negara di Asia Tenggara (ASEAN). Hal ini dijelaskan dengan minimnya peran Rusia dalam hal kerja sama dan insekualitas akibat dominasi Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok yang sudah mengakar kuat di kawasan. Namun demikian, administrasi Putin mencoba meningkatkan perhatiannya ke ASEAN dengan meningkatkan ikatan kerja sama dalam sektor pertahanan dan keamanan, energi, perdagangan dan *people to people contact*. Tulisan ini mengulas pendekatan 'etis' berupa pola kebijakan kerja sama yang diimplementasikan oleh Moskow serta rekomendasi diversifikasi kerja sama Rusia dengan negara di Asia Tenggara seperti Indonesia.

Kata kunci: Perkembangan ekonomi; Kolaborasi; ASEAN; Rusia Timur Jauh

Pendahuluan

Kompleksitas tata-tatanan ekonomi global membuat Rusia memikirkan kembali posisi geopolitik dan pendekatan ekonomi. Runtuhnya Uni Soviet pada 1991,

melahirkan Rusia yang menempatkan banyak perhatian dalam penguatan institusi seperti *Eurasian Economic Union* (EAEU) guna mempertahankan supremasi dan kontrol bagi

bekas negara satelit. Pasca Uni Soviet juga ditandai dengan ketidakpastian dan kegagalan Rusia dalam mencoba untuk bertransisi menjadi negara yang demokratis dengan sistem ekonomi liberal. Faktor-faktor ini membuat para pembuat kebijakan di Moskow untuk berpikir ulang tentang *grand strategy* guna meningkatkan posisi tawar Rusia di dunia.

Citra global Rusia kembali terpuruk akibat aneksasi Kremlin terhadap Krimea di 2014. Hal ini mengakibatkan perpanjangan sanksi ekonomi yang diberikan oleh Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS). Selain berdampak mengurangi keuntungan dari hubungan dagang, sanksi ekonomi juga membuat kenaikan harga komoditas secara mendadak. Krisis ekonomi dalam pasar global di *Eurozone* telah menyebabkan efek domino bagi ekonomi Rusia. Perdana Menteri Dmitry Medvedev mengatakan bahwa sanksi telah membuat kerusakan berarti bagi perekonomian Rusia (Roth, 2015).

Rusia tentunya ingin mengembalikan kejayaan pengaruhnya di masa lalu. Pada era modern saat ini, cara untuk menjadi diakui di kompetisi global adalah penguatan diplomasi ekonomi. Presiden Vladimir Putin mengulangi pernyataan itu ketika mengunjungi Shanghai bahwa Rusia menggunakan strategi *'Turn to East'* (Petrovsky, 2014) dan Bhavna Dace (2016). Tercatat bahwa poin deklarasi tersebut menjadi prioritas pada awal pemerintahan Putin. Skema poros ke timur (Rusia: *povorot na Vostok*) atau *Pivot to Asia* (Rusia: *povorot ke Azii*) sudah dicanangkan sejak tahun 2001. Strategi tersebut diklasifikasi menjadi tiga tujuan utama pemerintah Rusia.

Pertama, mempercepat pengembangan kawasan Timur Jauh Rusia agar lebih terintegrasi dengan Kawasan Asia-Pasifik. Kedua, meningkatkan pengaruh Rusia di Kawasan Asia Pasifik berdasarkan kemitraan eratnya dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan diversifikasi komoditas ekonomi. Ketiga, memperluas hubungan ekonomi, komersial dan strategis dengan ASEAN melalui Vietnam dan Laos dan penjangkauan

kerja sama multilateral melalui *Eurasian Economic Community* (EAEU) dan *Shanghai Cooperation Organization* (SCO).

Pendekatan hubungan diplomatik yang diadopsi oleh administrasi Putin berfokus pada Kawasan Timur Jauh (Sino-sentris). Prioritas pertama pada sektor energi khususnya pada pasokan minyak dan gas, perdagangan, transfer teknologi, dan perjanjian kerja sama ekonomi. Strategi Rusia *'Turn to the East'* terbukti lebih tahan lama dan substansif daripada kebijakan masa lalu. Fenomena ini disebabkan karena pusat gravitasi ekonomi global mulai bergerak dari Eropa-Atlantik ke Asia-Pasifik. Dinamika keamanan kawasan pun menjadi lebih kompleks (Dave, 2016). Rotasi tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari status hegemon Rusia (Koldunova & Rangsimalon, 2016 di The ASAN Forum, Juli 2016). Di sisi lain juga terjadi eskalasi arsitektur keamanan oleh AS dan RRT di kawasan Asia-Pasifik.

Identitas Neo-Eurasianisme

Moskow menyadari bahwa strategi global dalam Sino-sentris tetap harus menyertakan Eurasia. Para ahli geopolitik Rusia seperti Mikhail Titarenko dan Vladimir Petroskii menggambarkan identitas Neo-Eurasia oleh Rusia. Mereka berpendapat bahwa di Rusia, *'Turn to East'* memiliki makna ideologis mendalam yang tertanam dalam cara hidup dan budaya Rusia.

Gambar 1. Peta Rusia Timur Jauh
Manifestasi budaya dari identitas Rusia yang kuat mempengaruhi cara pemerintah

Putin dalam merancang jenis kebijakan di Kawasan Eurasia. Budaya Eurasia merupakan definisi ulang dari hubungan yang berakar kuat dalam sistem politik luar negeri Rusia dalam periode Uni Soviet.

Putin menegaskan bahwa Eurasianisme mengacu pada tradisi pemikiran politik Rusia yang mengakar dan memiliki landasan historis dan filosofi. Perlakuan setara dalam budaya Eurasia, termasuk tidak memilih budaya Rusia karena kemajemukan etnis.

Hakikat Eurasianisme menjelaskan tentang sifat-sifat baik dalam kemanusiaan seperti rukun, kerja sama, tolong menolong



dan pendekatan damai daripada persaingan (*The ASAN Forum, Mei 2016*). Titarenko dan Petroski mencatat bahwa Rusia mencoba bersikap obyektif dalam paradigma Eurosentrisme dengan menggunakan Eurasianisme untuk menjembatani EAEU dan *Belt Road Initiative* (BRI).

Putin menganggap kawasan Timur Jauh Rusia sebagai pintu gerbang utama ke Asia Tenggara. Kawasan ini membutuhkan strategi pembangunan yang konkret dan berkesinambungan. Wilayah yang meliputi Siberia, Vladivostok, Khabarovsk dan Yakutia masih minim populasi dan dianggap sebagai kawasan terbelakang, jika dibandingkan dengan Moskow atau Saint Petersburg yang dekat dengan Eropa. Rusia ingin memanfaatkan potensi wilayah Timur Jauh yang berbatasan langsung RRT, Mongolia, Jepang dan Korea untuk memperluas pengaruhnya di Asia-Pasifik. Adanya hubungan antara EAEU dan BRI diharapkan akan membuka potensi daerah dalam menciptakan peluang untuk investasi yang diiringi dengan pertumbuhan dan peningkatan pergerakan modal, barang, jasa dan tenaga kerja. Namun, Rusia juga dihadapkan pada berbagai masalah. Salah satunya kendala birokrasi seperti anggaran. Para elit Rusia umumnya lebih suka berhubungan dengan Eropa daripada Asia. Investor dari Rusia juga lebih ingin

memperkuat bisnis mereka di Eropa Barat daripada investasi di kawasan Timur Jauh.

Putin kemudian mendirikan Kementerian Pengembangan Timur Jauh Rusia *Minvostokrazvitiya* (MDFE) di 2012. Kementerian yang ditugaskan sebagai bagian dari implementasi program pemerintah pusat dan program pemerintah federal. MDFE diproyeksikan menjadi program jangka panjang oleh Kremlin (Situs resmi MDFE, 2020). Alexander Galushka diangkat sebagai Menteri MDFE pertama pada 2013. Kepemimpinan Galushka menandai perubahan strategi dalam pembangunan di kawasan Timur Jauh Rusia. Pada 2018, Galushka digantikan oleh Alexander Kozlov. Misinya tetap sama.

Pergeseran dari pembangunan lokal yang berorientasi pada infrastruktur dan transportasi saat ini beralih menjadi program padat karya yang berfokus pada penguatan industri perdagangan dan investasi ke negara-negara di Asia Pasifik. Dalam sektor modernisasi militer dan pertahanan, Putin berkomitmen dengan investasi besar-besaran di wilayah Timur Jauh. Perdana Menteri (PM) Medvedev meluncurkan program investasi sebanyak 500 miliar rubel (sekitar US\$ 16 miliar) pada 2013. Dia mengarahkan pemerintah dalam komitmen pendanaan dari 100 miliar rubel (sekitar US\$ 3,22 miliar) per tahun hingga 2018 (Dave, 2016). MDFE juga ditugaskan dalam pembentukan dan regulasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK akan memudahkan pergerakan barang dan komoditas bebas pajak di seluruh wilayah. Strategi ini akan menarik lebih banyak investasi dari Cina, Jepang, dan Korea Selatan.

Reformasi kebijakan pembangunan adalah alat bagi Rusia untuk menembus dominasi Cina, Jepang, dan Korea Selatan di kawasan Indo-Pasifik. Moskow menggunakan pendekatan yang lebih pragmatis dan realistis untuk manfaat ekonomi yang lebih besar. Hal ini dilakukan guna mendapatkan kembali citra hegemon di wilayah tersebut seperti era Soviet. Untuk mewujudkan hal ini, Rusia menganggap kawasan Asia Tenggara dan ASEAN sebagai

penyangga aktivitas ekonomi yang berpusat pada kawasan Asia Pasifik. Perekonomian negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Vietnam yang sedang meningkat dipandang cukup menjanjikan bagi Moskow. Mereka berpeluang besar melibatkan diri di wilayah tersebut. Ditambah integrasi ekonomi antar negara ASEAN. Intinya, Moskow akan fokus pada tiga aspek area kerja sama dalam meningkatkan trek hubungan Rusia dan ASEAN. Area-area ini meliputi kerja sama pertahanan dan keamanan, pengembangan sektor energi dan pertambangan dan *people to people contact*.

Integrasi ASEAN

ASEAN berdiri 8 Agustus 1967. Deklarasi Bangkok yang disepakati oleh lima pendiri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tujuan utamanya memastikan kestabilan politik dan keamanan kawasan yang berpusat dalam kerja sama ekonomi. ASEAN menambah keanggotaannya mulai dari Brunei Darusalam (1984), Vietnam (1995), Laos dan Myanmar (1997) dan Kamboja (1999). Timor Leste telah mengupayakan keinginan untuk bergabung dengan ASEAN di 2011. Sampai sekarang, proposal yang diberikan masih dipertimbangkan.

ASEAN adalah organisasi kawasan yang anggota dan partner dialognya bebas berdiskusi dalam memberikan solusi bagi masalah internal, eksternal dan tantangan ke depan. Dari sebatas forum, menjadi ajang diskusi politik dan isu keamanan menuju integrasi ekonomi, sosial, dan budaya. Integrasi melalui pendekatan dialog dalam kerja sama regional melalui konsensus dan fleksibilitas yang disebut sebagai *the ASEAN Way*.

ASEAN mengedepankan dialog dalam arsitektur regional melalui mekanisme *ASEAN Regional Forum (ARF)*, Asia-Eropa Meeting (ASEM), ASEAN Plus 3 (RRT, ROK dan Jepang), East Asia Summit (ASEAN plus Australia, RRT, India, Jepang, ROK dan Selandia Baru). Pada *ASEAN Summit* ke 12, para pemimpin negara

memutuskan untuk mentransformasikan ASEAN ke dalam suatu kawasan yang solid dan kompetitif dengan pembangunan ekonomi yang setara, penurunan angka kemiskinan ekonomi melalui integrasi ekonomi regional dalam Komunitas ASEAN di 2015, yang bertumpu pada tiga pilar yaitu: Politik & Keamanan (APSC), Ekonomi (AEC) dan Sosial Budaya. (ASCC).

Dinamika Hubungan Rusia-ASEAN

Hubungan Rusia-ASEAN memiliki sejarah panjang. Setelah Perang Dunia II, Rusia menyediakan banyak bantuan luar negeri bagi negara-negara di Asia Tenggara dalam bentuk bantuan dana. Kegiatan yang dilakukan guna mengembalikan perekonomian negara pasca perang. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov mencatat bahwa Rusia memiliki sejarah hubungan yang dekat dengan negara Indochina dan Indonesia. Persahabatan dengan Thailand yang tidak pernah putus. Hubungan baik dengan Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei. Menlu Lavrov dalam *'Mezhdunarodnaya zhizn'* menitikberatkan hubungan Russo-ASEAN.

Lavrov memperkenalkan ASEAN sebagai pusat dari wilayah Asia Pasifik, yang akan kembali menjadi pusat dari dunia ekonomi dalam arsitektur kawasan global yang polisentris (*The ASEAN Forum Country Report, July 2016*).

Hubungan bilateral yang komprehensif telah diperkuat ketika Rusia turut berpartisipasi di *ASEAN Regional Forum (ARF)* di 1994. ARF adalah forum diskusi dalam bidang politik dan keamanan dan pencarian solusi melalui mekanisme dialog. Rusia menjadi mitra dialog ASEAN secara resmi di 1996. Hal ini ditandai dengan persetujuan Rusia terhadap pakta non agresi ASEAN, traktat persahabatan dan kerja sama (TAC) di 2004. Rusia bersama AS juga bergabung dalam *East Asia Summit (EAS)* di 2011.

Artikel berjudul, "*Can Russia be a Leader in East Asian Economic Integration?*" (2016), oleh Ekaterina Koldunova, Profesor di *Moscow State*

Institute of International Relations (MGIMO) menulis bahwa kepemimpinan Rusia menyadari satu cara termudah menaikkan *political leverage* adalah berpartisipasi di kerja sama regional. Rusia banyak bergabung dalam organisasi kerja sama kawasan. Melalui jejaring ini kehadiran dan partisipasi Rusia menjadi lebih nyata dalam proses integrasi di kawasan Asia Pasifik. Seperti yang terjadi di 2012, ketika Rusia menjadi tuan rumah di Forum Kerja Sama Asia Pasifik (APEC). Forum ini adalah kendaraan bagi Rusia untuk menjembatani kesenjangan antara pengaruh politik dan ekonomi mereka di kawasan. Di sisi lain Rusia membuktikan kemampuannya sebagai *game changer* untuk kerja sama ekonomi regional. Caranya melalui pendekatan untuk pengembangan kerja sama kawasan (Koldunova, 2016).

Beberapa kerja sama penting antara Rusia – ASEAN meliputi Deklarasi Bersama dalam Kerja Sama untuk Perdamaian dan Keamanan dan Kesejahteraan dan Pembangunan di Asia Pasifik, Deklarasi Bersama dalam Kerja Sama Berkelanjutan dan Komprehensif 2005-2015, *Comprehensive Partnership Agreement* (CEPA) dan Kerja Sama dalam Ekonomi dan Pembangunan (Kozyrev, 2016).

Saat ini, Rusia memimpin EAEU. EAEU telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Vietnam di Mei 2015. Hal ini menunjukkan keinginannya berintegrasi dengan perekonomian ASEAN. Pemerintah Rusia juga menjadi tuan rumah dalam peringatan ulang tahun ke 20 *ASEAN Dialogue Partner* pada 19-20 Mei 2016 di Sochi. Rusia menginginkan bentuk mekanisme integrasi jaringan antara EAEU, ARF dan SCO (Kozyrev, 2016). Perkembangan EAEU membuat Rusia berambisi meningkatkan kerja sama antara kawasan Asia Timur dan Tenggara. Anggota EAEU antara lain Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan dan Rusia. EAEU bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan yang akan memaksimalkan pendapatan melalui

pergerakan bebas dari barang, jasa, dan tenaga kerja.

Faktor ini mengindikasikan bahwa Rusia telah menaikkan prioritas terhadap kawasan ASEAN sebagai mitra yang tak tergantikan untuk sektor ekonomi, politik, dan social budaya. Berakar dari Eurasianisme yang menginginkan integrasi berkesinambungan, inklusif dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Rusia juga memperhatikan dinamika dalam sektor pertahanan. Saat ini, risiko konflik di Laut Cina Selatan (LCS) tetap tinggi. ASEAN mengakui bahwa negara-negara yang beririsan dalam konflik LCS akan terus memanas ketika terprovokasi. Tidak tertutup kemungkinan akan bereskalasi menjadi perang. Partisipasi Rusia di ASEAN sebagai salah satu platform dialog untuk menjaga kestabilan dan perdamaian. Ian Storey, Peneliti Senior di *Institute of Southeast Asian Studies* (Yusof Ishak Institute) menggarisbawahi bahwa Kremlin tidak akan mengintervensi Cina dan Vietnam, mitra terdekat Rusia di wilayah. Imbasnya Rusia akan sulit untuk menentukan posisinya dalam konflik tersebut (Lavrov, 2010). Namun posisi Rusia tegas menyatakan bahwa negara-negara yang terkait harus menghormati hukum internasional yang berlaku. Kesepakatan damai bersama atas masalah dititikberatkan pada ketaatan hukum dibawah *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*.

Rusia dalam berbagai macam forum menekankan bahwa negara harus mematuhi *Code of Conduct* antara ASEAN-RRT tentang Aturan Bersama di LCS (*CoC*). Presiden AS, Barrack Obama telah mendeklarasikan strategi Asia-Pasifik sebagai pivot di 2010. AS sebagai kekuatan ekonomi dan politik global, mengambil kebijakan yang tepat dalam mempertahankan status quo di kawasan. Asia Pasifik adalah tempat bagi perkembangan ekonomi yang menarik minat berbagai pihak yang berkepentingan. Rusia harus lebih waspada dalam kesepakatan yang diberikan oleh AS guna mempertahankan kekuatannya yang selama ini berakar di Asia Pasifik. Salah satu

cara untuk masuk ke ASEAN adalah melalui RRT dengan kebijakan *Belt Road Initiative* (BRI) yang sudah terkoneksi dengan Asia Tenggara. Hal selanjutnya yang tidak kalah penting adalah analisis terhadap tiga aspek kerja sama dimana Rusia bisa berpartisipasi aktif dalam ASEAN.

3. Area Kerja Sama Prioritas Rusia - ASEAN

Pasang surutnya hubungan antara Rusia dengan UE dan AS terus terjadi. Rusia menganggap peran unik ASEAN sebagai *pivot* dalam integrasi kawasan adalah kunci dalam stabilitas keamanan di Asia Pasifik. Rusia memiliki hubungan baik dengan beberapa negara anggota ASEAN seperti Indonesia, Vietnam, Laos dan Thailand. Bagian ini akan menganalisis beberapa perluasan kerja sama di mana Rusia bisa berinteraksi lebih dalam di Asia Tenggara. Hubungan yang terjalin antara Rusia dengan Indonesia masih dianggap sporadis dan tidak konsisten. Rusia tidak pernah berpartisipasi dalam beberapa pembicaraan politik penting diplomatik di *East ASEAN Summit* (Lavrov, 2010). Forum Diskusi Valdai Bersama dengan Habibie Center di Jakarta di akhir 2015 mencatat bahwa ada peningkatan intensitas hubungan yang cukup positif saat ini.

Hal ini bisa dipahami sebagai dua acara, pertama, pola hubungan Rusia dikategorikan sebagai salah satu gagasan untuk mempertahankan citranya sebagai kekuatan geopolitik dan ekonomi sebagai bagian dari bangsa Eropa sekaligus Asia. Rusia yang secara geografis terletak dalam dua benua membuatnya sangat mudah untuk mengarahkan kepentingan-kepentingan internal di Asia Tengah dan Asia Timur.

Kedua, Rusia saat ini banyak menghadapi masalah dalam negeri. Perkembangan paket kebijakan yang tidak terlalu cocok dengan sistem ekonomi liberal, tingginya korupsi dan sentralisasi membuat Rusia harus mengganti kebijakan untuk mengalihkan perhatian penduduk Rusia dari kekacauan domestik (Smith, 2016). Meskipun terdapat banyak rintangan, Rusia

tetaplah *'game changer'* di kawasan. Strateginya adalah peningkatan prioritas dalam konektivitas kawasan.

3.1 Kolaborasi Pertahanan dan Keamanan

Kremlin memusatkan perhatiannya dalam rencana ambisius yakni modernisasi kekuatan militer selama lebih dari dua dekade. Revitalisasi aset militer telah dilakukan untuk menggantikan perangkat militer dan pertahanan kuno peninggalan era Soviet. Koldunova & Rangsimalon (*The ASAN Forum, July 2016*) menyebutkan bahwa kepentingan Rusia sebagai salah satu eksportir senjata terbesar. Rusia adalah salah satu kekuatan militer dunia yang memiliki pandangan politik yang sama dengan negara-negara ASEAN. Perannya di Dewan Keamanan PBB sebagai pendukung bagi kedaulatan demokrasi dengan kebijakan politik luar negeri yang mandiri dan menolak adanya intervensi dalam kebijakan domestik negara lain. Pandangan ini memang tidak terlalu konsisten dengan implementasi di dunia nyata. Pelanggaran dibuktikan dengan invasi Rusia ke Georgia di 2008, intervensi dalam perang sipil di Suriah pada 2013, dan aneksasi Krimea di 2014.

Operasi militer yang dilakukan oleh Rusia dianggap sebagai aksi positif untuk memastikan perdamaian dan kestabilan dalam area yang menjadi sasaran konflik. Rusia berperan sebagai *'penjamin perdamaian'* untuk mempertahankan wilayah yang dianggap membutuhkan pengelolaan institusi militer dan pertahanan yang lebih modern. Namun banyak pihak yang menyadari bahwa strategi dan rencana pendanaan Rusia dalam sector ini masih cukup pincang. Krisis finansial global yang terjadi saat ini berkontribusi dengan timpangnya kekuatan militer yang dimiliki.

Putin mengumumkan rencana 10 tahun modernisasi militer Rusia di 2010, Storey (2015). Anggaran pertahanan militer Rusia kini bertambah dua kali lipat, dari \$58,7 miliar menjadi \$84,5 miliar untuk menjadi terbesar ketiga setelah AS dan RRT pada periode 2010 dan 2014. Rusia juga menjadi salah satu eksportir utama senjata di dunia. Sejauh ini mitra utama ekspor senjata Rusia

adalah India (39%) dan RRT (11%). Indonesia sendiri memesan armada pesawat tempur Sukhoi tipe SU-35 untuk memperkuat pertahanan dirgantara di 2019. Rusia juga menawarkan teknologi nuklir bagi Indonesia, Myanmar dan Kamboja. Selain itu Malaysia juga tertarik untuk bekerja sama dalam pengadaan sistem peluru kendali jarak jauh dan pesawat jet. Selain memperluas kehadiran militernya di ASEAN melalui perdagangan senjata, pemerintah Rusia juga berperan meningkatkan kapasitas dan pelatihan SDM melalui pertukaran tenaga ahli (SMEEs) dan pelatihan penanggulangan terorisme, keamanan maritim, Badan Search and Rescue Nasional (BASARNAS) dan kerja sama kemanusiaan.

Rusia melihat kesempatan sebagai anggota dari *ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) Plus* sebagai penegas statusnya sebagai penjamin perdamaian, ADMM Plus dibentuk oleh anggota ASEAN termasuk Australia, RRT, Jepang, India, RoK, Selandia Baru, Rusia dan AS pada 2010. Tujuan ADMM Plus adalah memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan untuk perdamaian, kestabilan dan pembangunan kawasan

Difersivikasi Energi

Energi adalah salah satu elemen penting dalam menjamin keberlangsungan kawasan. Para ahli migas meyakini bahwa negara anggota ASEAN diperkirakan akan mengalami kekurangan pasokan energi di masa depan. Menipisnya cadangan ini ditunjukkan dengan semakin cepatnya perkembangan industri manufaktur di kawasan. Adanya pasokan yang besar dari minyak bumi, gas dan energi alternatif terbarukan (nuklir, biofuel atau biogas) kelak akan menjadi kebutuhan. Rusia memiliki keunggulan komparatif di sector energi dan gas. Andrew Wood (2013), salah satu peneliti *the Russia and Eurasia Programme di Chatham House* mengatakan bahwa Rusia sangat dibutuhkan dalam sektor migas serta energi terbarukan.

Kebijakan Strategi Energi Rusia 2030 mengklaim bahwa instalasi pembangkit

tenaga nuklir akan menjadi konsumsi utama dan merelokasi kebutuhan gas bumi dalam ekspor global. Rusia mewarisi gaya manajemen Soviet dalam kebijakan energi minyak bumi dan gas sehingga membuat mereka sulit untuk masuk ke dalam pasar baru. Negara-negara Asia Tenggara memiliki beberapa sumber energi yang sebagian besar diimpor dari negara Arab. Perkembangan baru dalam eksplorasi gas telah dilakukan di Indonesia, Malaysia dan Filipina. Di sisi lain, negara maritime di Asia Tenggara selalu melihat energi alternatif lain, yang menawarkan harga lebih murah untuk minyak bumi dan gas bagi konsumsi dalam negeri.

Administrasi Putin menciptakan infrastruktur baru (sistem perkeretaapian, bandara, pelabuhan dan KEK) di Rusia Timur jauh sebagai kunci untuk masuk ke pasar Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kebijakan ini mencakup diversifikasi pasar dengan memperluas investasi di kawasan Siberia serta menambah pasokan gas alam dengan RRT dan Jepang. Rusia sudah lama dikenal dengan inovasi teknologi dan penelitian, yang mampu meningkatkan kerja sama energi di Asia Tenggara. Di Indonesia, Rusia berniat untuk ikut dalam eksplorasi minyak di Tuban dengan menggandeng perusahaan Rosneft. Pada tahun 2025 diproyeksikan kilang ini akan memproduksi BBM dan sebanyak 30-50% dipasok dari Rusia. Kawasan ASEAN dipandang sebagai mitra eksportir penting untuk perkembangan energi minyak bumi dan gas.

People to People Contact

Rusia juga mulai bergerak dalam strategi bisnis yang dulu sangat erat dengan kawasan Eropa menjadi condong ke Timur Jauh. Kremlin berusaha untuk mendiversifikasikan pasar domestik melalui penyediaan barang dan jasa ke RRT, Jepang dan ASEAN. Meskipun masih kecil, Rusia telah memiliki hubungan dagang yang baik dengan Asia Tenggara. Pasar ASEAN saat ini masih terbuka dan menarik bagi para investor tetapi Rusia hanya berkontribusi 1% dalam total perdagangan ASEAN (Sumsy dan

Kanaev, 2014). Salah satu penyebab utama terletak pada masih minimnya diaspora sumber daya manusia dan representasi bisnis Rusia di kawasan. Tidak seperti AS, Jepang atau Korea Selatan, kurangnya kapasitas bisnis untuk masuk ke dalam pasar regional hanya bisa dilakukan melalui korporasi multinasional hingga transnasional. Keanggotaan Rusia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bisa meningkatkan daya tawar meskipun terikat dalam peraturan WTO.

Kopi dan produk minyak sawit asli Indonesia saat ini menjadi salah satu primadona di bumi Rusia. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Moskow pada 2018 mencatat, hubungan antara ASEAN dengan Rusia dalam titik puncak. Ini terlihat dari total nilai perdagangan yang mencapai USD19 miliar atau setara Rp267 triliun pada 2018.

Di sektor pariwisata, sebagian besar generasi muda Rusia sekarang mempertimbangkan kawasan Asia Tenggara sebagai tujuan wisata. Yang tak kalah menarik yakni sektor pendidikan, generasi muda dari Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam semakin berminat mencari peluang beasiswa di Rusia. Sebagai catatan, pada era Presiden Sukarno, jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di tingkat perguruan tinggi di Rusia mencapai 4000-5000 orang. Dalam hal studi tentang bahasa dan budaya Rusia, Putin telah membuka *Russkiy Mir Foundation* (Yayasan Dunia Rusia) untuk mempromosikan cara hidup orang Rusia. Di level ASEAN, ASEAN Center (Pusat ASEAN) didirikan pada Universitas MGIMO. Misinya untuk menyebarkan informasi tentang kemitraan dialog ASEAN-Rusia dan memfasilitasi pengembangan hubungan ekonomi, pertukaran budaya, ilmiah dan pendidikan serta kontak antara generasi muda Rusia dengan generasi muda negara-negara anggota ASEAN. Pusat ini juga melaksanakan dan mendukung penelitian akademisi tentang masalah-masalah ASEAN dan perkembangan masing-masing.

Perkembangan terbaru dalam dunia pendidikan saat ini lebih dari 600 mahasiswa Indonesia menuntut ilmu di negeri beruang merah hingga 2020. Data dari Perhimpunan Pelajar Indonesia di Rusia (PERMIRA), sebagian besar mahasiswa asal Indonesia melanjutkan studi di bidang master pada bidang teknik, ilmu alam, kedokteran dan sosial humaniora. Negara-negara ASEAN lain seperti Malaysia, Myanmar dan Thailand sendiri mengirimkan ribuan mahasiswa tiap tahun ke berbagai kota di Rusia. Fokus studi yang mereka tempuh antara lain kedokteran dan teknik.

Semua negara anggota ASEAN dengan Australia, Cina, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan saat ini sedang mengembangkan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). RCEP menjalin kerja sama di bidang perdagangan barang dan jasa, kerja sama ekonomi dan hal teknis lainnya. Perjanjian ini dilakukan untuk penetrasi pasar yang jauh lebih besar. Rusia harus memikirkan kembali untuk kemitraan yang lebih besar di bidang ekonomi. RCEP dianggap sebagai alternatif dari *Trans Pacific Partnership* (TPP) yang menjadi ancaman potensial bagi Rusia. Negara-negara ASEAN lebih tertarik pada manfaat yang dapat mereka peroleh dengan TPP daripada dengan EAEU. Pada bagian terakhir, makalah ini menyoroti rekomendasi dalam memenuhi tujuan dan akhirnya menyajikan prospek untuk hubungan Rusia dan Asia Tenggara.

Rekomendasi

Untuk mencapai target dalam proyeksi masa depan hubungan Rusia di Asia Tenggara dan khususnya Indonesia. Penulis merekomendasikan tiga kemungkinan tentang bagaimana meningkatkan hubungan ekonomi bilateral dan kerja sama internasionalnya di ASEAN.

Pertama, Rusia perlu mereformasi kebijakan dalam negeri dalam bentuk efisiensi birokrasi. Good governance & penegakan hukum harus diimplementasikan sebelum terlibat dalam hubungan komprehensif dengan negara-negara Asia Tenggara. Setelah runtuhnya Uni Soviet,

masyarakat Rusia dihadapkan dengan kekosongan kekuasaan institusional yang dahulu dikendalikan di tingkat pusat (sentralisasi) menjadi desentralisasi. Transisi inilah yang disebut paska-Soviet. Sistem demokratis yang dinahkodai Mikhael Gorbachev dan Boris Yeltsin di periode awal terbukti gagal diimplementasikan di Rusia. Momen ini sering digambarkan sebagai kegagalan demokrasi premature. Di mata dunia Barat, Rusia dianggap masih jauh dalam hal kebebasan media dan pemerintahan demokratis. Putin juga dicap gagal dalam beberapa hal terutama dalam menangkap aspirasi dan menanggapi keluhan warga negara dalam menyediakan pelayanan dasar seperti pendidikan, pekerjaan dan jaminan sosial. Ekonomi Rusia yang melemah karena sanksi embargo yang dijatuhkan Uni Eropa akan mengakibatkan resesi ekonomi jika tidak diatur dengan benar. Ada urgensi untuk membangun kembali citra Rusia yang tercemar di mata dunia, khususnya opini Barat. Untuk itu ada beberapa hal yang bisa direkomendasikan untuk memikirkan kembali kebijakan dalam dan luar negeri Rusia yang merakyat.

Kedua, Rusia perlu menawarkan produk dan layanan yang beragam ke negara-negara Asia Tenggara. Jika ingin menarik investor ke tren ekonomi positif, Rusia harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya dalam membangun infrastruktur di kawasan Rusia Timur Jauh. Perlu dibangun lebih banyak infrastruktur, transportasi dan hubungan komunikasi, dan menetapkan langkah-langkah pengaturan untuk memberantas korupsi, sehingga mengurangi biaya transaksi dan pungutan lainnya. Pengaturan ulang, efisiensi dan birokrasi good governance harus diprioritaskan saat ini melalui rute EAEU dan ASEAN. Dalam hal mengupayakan bentuk perjanjian perdagangan, Rusia telah bergabung dengan WTO sebagai anggota resmi di 2012. Rusia dapat menggunakan keanggotaannya untuk memproyeksikan bahwa mereka mematuhi aturan dan prosedur dalam skema perdagangan yang adil. Untuk menyeimbangkan, Rusia perlu juga

meningkatkan Dewan Bisnis Rusia-ASEAN saat ini yang akan mendorong kerja sama ekonomi, mempromosikan kegiatan investasi, menciptakan kesadaran sosial-budaya, dan bertukar alih teknologi inovasi.

Ketiga, Rusia perlu mematuhi hukum internasional dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Mereka harus memelihara dan menjaga perdamaian serta stabilitas melalui posisi politiknya saat ini. Forum seperti ARF, EAS, EAEU dan SCO bisa menjadi jalan bagi Rusia untuk membahas dan merekomendasikan penyelesaian sengketa kawasan secara damai. Dalam sengketa SCS, jika ingin mendapatkan persetujuan dari negara-negara Asia Tenggara dan mereka harus bersikap tegas sebagai penggaransi perdamaian. Dialog konstan dalam bentuk konstruktif melalui skema bilateral dan multilateral harus dilakukan tentang masalah ini.

Di sisi lain, Rusia juga perlu mempertahankan hubungan positif dengan RRT. Menyinggung relasi Putin dengan Presiden Xi Jinping, sangat jelas bahwa Rusia menggunakan pendekatan yang pragmatis dalam keterlibatannya dengan ASEAN baik dalam masalah politik, ekonomi, hingga sosial budaya. Adapun beberapa kendala bagi Rusia untuk memenuhi targetnya di masa depan termasuk kestabilan politik domestik, pertumbuhan ekonomi, proses ekspansi ke Timur Jauh dan pemeliharaan citra globalnya. Hal ini masih diperjuangkan di tengah meningkatnya ketegangan di ASEAN dalam perselisihan SCS yang semuanya ini dianggap sebagai tantangan bagi Pemerintah Putin. Jika Rusia ingin memproyeksikan citra sebagai hegemon global yang kuat dan efektif, Rusia harus mempertimbangkan tiga bidang kerja sama yaitu kolaborasi keamanan dan pertahanan; diversifikasi pengembangan energi; dan pola perdagangan *business to business* (B2B) dalam *people to people contact*.

Kesimpulan

Jika berhasil dalam menyatukan potongan-potongan puzzle ini, tidak mustahil

akan memperbesar peluang Rusia dalam menarik perhatian khalayak pada kerja sama ekonomi dan investasi bisnis di ASEAN. Pemerintah Rusia harus berinvestasi dalam banyak ketiga sektor tersebut agar kembali menginjakkan kakinya di kawasan Asia Tenggara.

Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Rusia yang genap berumur 70 tahun pada 2020, ada banyak hal yang bisa dikolaborasikan. Baik Jakarta dan Moskow memiliki banyak posisi yang sama dalam menyikapi isu-isu internasional dan regional, termasuk tantangan global. Potensi dan peluang kerja sama di sektor ekonomi, perdagangan, investasi, energi, pariwisata, iptek, pendidikan, sosial budaya, keamanan dan teknik militer adalah kunci.

Di sisi investasi, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi Rusia di ASEAN. Contohnya, investasi pembangunan kilang minyak senilai USD 16 miliar di

Tuban. Data dari Badan Koodinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi Rusia ke Indonesia pada periode Januari-September 2019 naik 10 kali lipat sebesar USD 17,29 juta dari USD 1,7 juta pada periode yang sama pada 2018. Angka yang besar namun belum maksimal dari potensi sebenarnya.

Momentum 70 tahun bisa menjadi salah satu pendorong utama dalam memperluas agenda pembangunan ekonomi dan politik di wilayah tersebut. Pemerintah Rusia sejauh ini memang belum mempertimbangkan ASEAN dan khususnya Indonesia sebagai salah satu pemimpin utama di kawasan Asia Tenggara dalam mengembangkan strategi geopolitik dan geoekonominya. Rusia harus mengimplementasikan perencanaan ulang kebijakan yang ambisius di ASEAN jika ingin mengamankan posisinya di arena global.

References

- Chuffrin, G., Hong, M., & Beng, K.B. (2006). *ASEAN-Russia relations*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. <https://doi.org/10.1355/9789812306425>
- Dave, B. (2016, May 17). WP297: *Russia's Asia pivot: Engaging the Russian Far East, China and Southeast Asia*. Retrieved from <https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/wp297/>
- Degterev, D. A., Li, Y., Trusova, A. A., & Chernyaev, M. S. (2018). Priorities of Russian and Chinese development cooperation to Asia and Africa: A comparative analysis. *Vestnik RUDN. International Relations*, 18(4), 888—905. <https://doi.org/10.22363/2313-0660-2018-18-4-888-905>
- Koldunova, E. (2016). Can Russia be a leader in East Asian economic integration?, *East Asia Forum Economics, Politics and Public Policy in East Asia and the Pacific*. Retrieved from <http://www.eastasiaforum.org/2016/08/17/can-russia-be-a-leader-in-east-asian-economic-integration/>
- Kozyrev, V. (2016). Russia-Southeast Asia relations: In China's shadow? *The ASAN Forum Open Forum*. Retrieved from <http://www.theasanforum.org/russia-southeast-asia-relations-in-chinas-shadow-2>
- Larionova, M. V., & Safonkina, E. A. (2018). The first five decades of cooperation for development. Actors, achievements and challenges. *International Organizations Research Journal*, 13(4), 96—121. DOI: 10.17323/1996-7845-2018-04-05
- Lavrov, S. (2010). Russia and ASEAN can achieve a great deal together. *International Affairs*. Retrieved from <https://interaffairs.ru/i/pdfasean/2.pdf>
- Lebang, T. (2010). *Sahabat lama era baru: 60 tahun pasang surut hubungan Indonesia-Rusia*. Jakarta, Indonesia: Kompas Gramedia.
- Mankoff, J. (2009). *Russian foreign policy: Return of great power politics*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Maslikhina V.Y. (2016). Special economic zones in Russia: Results evaluation and development prospects. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(1), 275—279
- Ministry for the Development of the Russian Far East (MDFE). (2020). *Government of the Russian Federation*. Retrieved from <http://government.ru/en/department/239/events/>
- Petrovsky, V. (2014). *Vladimir Putin in Shanghai: Russia is turning East*. Valdai Discussion Club, 23 May. Retrieved from http://valdaiclub.com/opinion/highlights/vladimir_putin_in_shanghai_russia_is_turning_east
- Press TV. (20 May 2016). *Russian trade with ASEAN expanding*. Retrieved from <http://www.presstv.ir/Detail/2016/05/20/466592/Russian-trade-with-ASEAN-expanding>
- Puzanova, O. (2016, August 12). Country report: Russia (July 2016). *TheAsanForum*. Retrieved February 27, 2020, from <http://www.theasanforum.org/country-report-russia-july-2016/>
- Puzanova, O. (2016, May 30). Country report: Russia (May 2016). *TheAsanForum*. Retrieved February 27, 2020, from <http://www.theasanforum.org/country-report-russia-may-2016/>
- Roth, A. (2015). Russian Premier says annexation of Crimea was worth sanctions fallout. *The New York Times*. Retrieved from <https://www.nytimes.com/2015/04/22/world/europe/crimea-russia-sanctions-medvedev.html>
- Russia and Burma discuss 'Favourable Conditions' for nuclear technology. (2015). *Democratic Voice of Burma*, 14 April 2015.

- Russia Indonesia Partnership to Build Future of Indonesian Nuclear Sector. (2015, October 7). *Jakarta Globe*, in Ian Storey, What Russia's 'Turn to the East' Means for Southeast Asia, *Yusof Ishak Institute*, 67
- Russian News Agency. (2016). *Russian Pacific fleet ships to join ADMM-Plus-2016 International naval exercise*. Retrieved from <http://tass.ru/en/defense/873724>
- Smith, S. (2016, January 6). *Russia's biggest challenges for 2016 are domestic*. Retrieved from http://www.realclearworld.com/articles/2016/01/06/russias_biggest_challenges_for_2016_are_domestic_111645.html
- Storey, I. (2015). What Russia's 'Turn to the East' means for Southeast Asia. *SIPRI Military Expenditure Database*. Yusof Ishak Institute, 67(3). Retrieved from http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database
- Sumsky, V., & Evgeny K. (2014). Russia's progress in Southeast Asia: Modest but steady. *Russian Analytical Digest* No. 145.
- Supriyadi W. M. (2020). *Merayakan 70 tahun hubungan Indonesia-Rusia*, Retrieved from <https://news.detik.com/kolom/d-4884052/merayakan-70-tahun-hubungan-diplomatik-indonesia-rusia>
- Wood, A. (2013). *How the Soviet inheritance holds back Russia's development*. Chatham House. Retrieved from www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Russia%20and%20Eurasia/0713pp_wood.pdf
- Zubacheva, K. (2015). Being a member of the WTO may not be that easy for Russia. *Russia Direct*. Retrieved from <http://www.russia-direct.org/analysis/being-member-wto-may-not-be-easy-russia>